



**ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DI SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

OLEH

**ISMAYANI NASUTION
NIM. 13 230 0021**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DI SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

OLEH

ISMAYANI NASUTION

NIM. 13 230 0021

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 2009011 015

Pembimbing II

Nurul Izzah Lubis, SE., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Ismayani Nasution**
Lampiran : 6 (Enam) Eksamplar

Padangsidimpuan, 30 Mei 2017

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ismayani Nasution** yang berjudul: "**Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 1986-2015**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Ekonomi Syariah konsentrasi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Nurul Izzah Lubis, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ismayani Nasution
NIM : 13 230 0021
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (ES-1. IE)
Judul Skripsi : **Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan
Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Mei 2017

Saya yang Menyatakan,



Ismayani Nasution
**Ismayani Nasution
NIM. 13 230 0021**

RESEMI-RESEMI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
PADA TANGGAL 30 MEI 2017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismayani Nasution
Nim : 13 230 0021
Jurusan : Ekonomi Syariah (ES-1.IE)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA.”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 30 Mei 2017

Yang Menyatakan,



Ismayani Nasution



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ISMAYANI NASUTION
NIM : 13 230 0021
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA
UTARA TAHUN 1986-2015

Ketua

Dr. Darwis Harahap S.HL., M.Si
NIP. 19780818200901 1 015

Sekretaris

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Anggota

Dr. Darwis Harahap S.HL., M.Si
NIP. 19780818200901 1 015

Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 14 Juni 2017
Pukul : 14.00 s/d Selesai
Hasil/Nilai : 80.63(A)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,75



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PENGELUARAN
PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI
SUMATERA UTARA TAHUN 1986-2015**

Nama : ISMAYANI NASUTION
NIM : 13 230 0021

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 21 Juni 2017

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : ISMAYANI NASUTION
NIM : 13 230 0021
Judul : Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan
Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 1986-2015

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari suatu negara, yang salah satunya ditentukan oleh pengeluaran pemerintah. Di Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi yang diikuti oleh pengeluaran pemerintah. Data pengeluaran pemerintah pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 63,1 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 6,3 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 1986-2015.

Teori Keynes, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara, hukum Wagner (*Wagner's Law*) menyatakan bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series yang berjumlah 30 sampel mulai tahun 1986-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis VECM (*Vector Error Correction Model*) menggunakan *eviews* 9.

Hasil dari penelitian ini memiliki hubungan yang searah, pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan nilai *probability* $0,0474 < 0,05$. Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai t-statistik 2,02069 persen. Sedangkan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dan berpengaruh negatif sebesar 0,080807 persen. Hasil *impulse response* menunjukkan bahwa respon pada variabel pengeluaran pemerintah akibat adanya *shock* pada variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif hingga periode ke-30, sedangkan respon variabel pertumbuhan ekonomi akibat adanya *shock* pada variabel pengeluaran pemerintah sangat kecil atau mendekati nol. Hasil dari *variance decomposition* pada variabel pengeluaran pemerintah pada tahun pertama dipengaruhi oleh variabel itu sendiri sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak merespon sama sekali, pertumbuhan ekonomi merespon mulai pada tahun kedua, sedangkan *variance decomposition* pada variabel pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel itu sendiri dan direspon oleh pengeluaran pemerintah.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur *Alhamdulillah* peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti sanjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat kelak.

Untuk menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul: **“Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 1986-2015”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun immaterial, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga , Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan

Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Isa, ST.,MM sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Ibu Delima Sari Lubis S.E., M.Si Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI merupakan pembimbing I dan Ibu Nurul Izzah Lubis, S., M.Si merupakan pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta (Ayahanda Iskandar Z Nasution dan Ibunda tercinta Ermawati Pane) yang telah membimbing dan selalu memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Terimakasih doa dari Abanghanda serta adik (Ahmad Ridwan Siregar, Fitri Yani Nasution, Indahliyani Nasution, Abdul Wahid Nasution) yang paling berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moral dan material demi kesuksesan Peneliti. Do'a dan usahanya yang tidak

mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

8. Sahabat-sahabat terbaik Bunga Febri Cilia Daulay, Silfana Dewi Koto, Juliati Siregar, Siti Azizah Nasution, Sri Devi yang selalu memberi semangat, doa dan dukungan kepada peneliti agar tak berputus asa, dan tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.
9. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2013, khususnya Ekonomi Syariah-1 yang selalu memberi dukungan, semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah bapak/ibu dan saudara-saudari berikan amat sangat berharga, peneliti mungkin tidak dapat membalasnya dan tanpa kalian semua peneliti bukan siapa-siapa. Semoga Allah SWT dapat memberi imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudari berikan kepada peneliti.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti masih perlu mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidempuan, 30 Mei 2017

Peneliti

ISMAYANI NASUTION
NIM. 13 230 0021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ...اَ...اَ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ...اُ...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Defenisi Operasional Variabel	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Kerangka Teori	11
1. Pertumbuhan Ekonomi	11
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	11
b. Indikator Menghitung Pertumbuhan Ekonomi	18
c. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam	20
2. Pengeluaran Pemerintah	22
a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah	22
b. Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah	27
c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah	31
d. Pengeluaran Pemerintah Dalam Islam	33
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pikir	41
D. Hipotesis	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel	43
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data	45
a. Uji Stasioneritas Data (<i>Unit Root Test</i>).....	46
b. Uji <i>Lag</i>	47
c. Uji Kausalitas Granger	47
d. Uji Kointegrasi	47
e. Model VECM (<i>Vector Error Correction Model</i>).....	48
f. IRF (<i>Impulse Response Function</i>).....	48
g. VD (<i>Variance Decomposition</i>)	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Variabel Penelitian	50
1. Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.....	50
2. Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara.....	54
B. Pemilihan Model Kausalitas	57
a. Uji Stasioneritas Data (<i>Unit Root Test</i>).....	57
b. Uji Pemilihan <i>Lag</i>	59
c. Uji Kausalitas Granger	60
d. Uji Kointegrasi	61
e. Uji VECM (<i>Vector Error Correction Model</i>).....	62
f. Uji IRF (<i>Impulse Response Function</i>).....	64
g. Uji VD (<i>Variance Decomposition</i>)	65
C. Pembahasan Hasil Penelitian	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 1986-2015	2
Tabel 1.2 Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara Tahun 1986-2015	5
Tabel 1.3 Defenisi Operasional Variabel.....	8
Tabel 2.1 Pelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	44
Tabel 4.1 PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 1986-2015	51
Tabel 4.2 Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara Tahun 1986-2015	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Stasioneritas Data (<i>Unit Root Test</i>).....	58
Tabel 4.4 Hasil Uji Pemilihan <i>Lag</i>	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Kausalitas Granger	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Kointegrasi	61
Tabel 4.7 Hasil VECM (<i>Vector Error Correction Model</i>)	62
Tabel 4.8 Hasil VD (<i>Variance Decomposition</i>).....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 1986-2015.....	3
Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara Tahun 1986-2015.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 3.1 Kerangka Pemilihan Model Estimasi Kausalitas	45
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 1986-2015.....	52
Gambar 4.2 Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara Tahun 1986-2015.....	55
Gambar 4.3 Hasil <i>Impulse Response Function</i> (IRF).....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Data Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara
- Lampiran 2 Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*) Pengeluaran Pemerintah Tingkat Level
- Lampiran 3 Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*) Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Level
- Lampiran 4 Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*) Pengeluaran Pemerintah Tingkat *First Difference*
- Lampiran 5 Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*) Pertumbuhan Ekonomi Tingkat *First Difference*
- Lampiran 6 Hasil Uji Penentuan *Lag*
- Lampiran 7 Hasil Uji *Granger Causality*
- Lampiran 8 Hasil Uji VECM (*Vector Error Correction Model*)
- Lampiran 9 Hasil Uji IRF (*Impulse Response Function*)
- Lampiran 10 Hasil Uji VD (*Variance Decomposition*)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan nasional dinilai untuk melihat prestasi ekonomi suatu bangsa atau negara secara umum. Angka pendapatan nasional dapat diperoleh dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan sebuah negara, untuk mencapai apa yang dicita-citakan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik berkesinambungan. Pembangunan ekonomi daerah juga diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui kemakmuran yang berkeadilan.¹

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang menentukan atau mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar Rp. 157,6 triliun. Secara keseluruhan perekonomian Sumatera Utara tahun 2015 tumbuh sebesar 5,0 persen, menurun

¹Andre Saptho, *Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Maluku Tahun 1994-2009*, Jurnal (Ambon: Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura, 2010), hlm. 22-23.

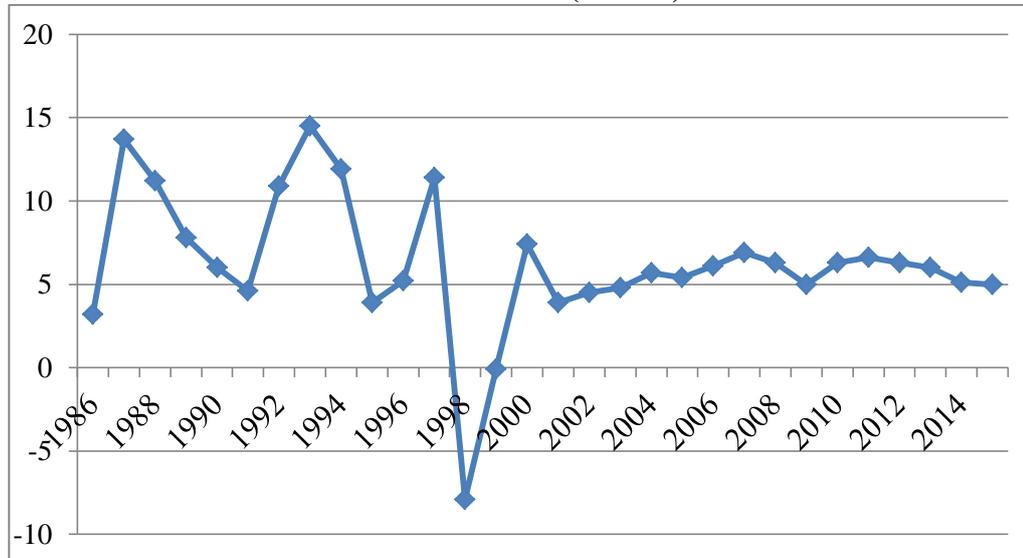
dibandingkan tahun 2014 sebesar 5,1 persen. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai data PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara
Tahun 1986-2015

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan (Persen)
1986	26.665.409	3,2
1987	30.336.268	13,7
1988	33.761.169	11,2
1989	36.369.447	7,8
1990	38.582.281	6,0
1991	40.370.436	4,6
1992	44.791.379	10,9
1993	51.291.832	14,5
1994	57.430.761	11,9
1995	59.679.064	3,9
1996	62.807.524	5,2
1997	70.007.744	11,4
1998	64.411.614	-7,9
1999	64.330.882	-0,1
2000	69.154.112	7,4
2001	71.908.359	3,9
2002	75.189.140	4,5
2003	78.805.608	4,8
2004	83.328.948	5,7
2005	87.897.800	5,4
2006	93.347.400	6,1
2007	99.792.300	6,9
2008	106.172.600	6,3
2009	111.559.200	5,0
2010	118.640.000	6,3
2011	126.487.200	6,6
2012	134.463.900	6,3
2013	142.617.700	6,0
2014	149.989.100	5,1
2015	157.632.900	5,0

Sumber: BPS Sumut, Data Diolah

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara
Tahun 1986-2015 (Persen)



Sumber: BPS Sumut, Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 di atas pertumbuhan ekonomi tahun 1986 sebesar 3,2 persen kemudian tahun 1987 meningkat menjadi 13,7 persen. Pada tahun 1991 turun menjadi 4,6 persen dan pada tahun 1993 meningkat menjadi 14,5 persen. Selanjutnya, pada tahun 1995 turun menjadi 3,9 persen dan pada periode 1996 sampai pertengahan 1997 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 11,4 persen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara relatif cukup tinggi. Pada periode pertengahan 1997 sampai 1998 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi minus 7,9 persen. Setelah krisis ekonomi berjalan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara meningkat tajam dalam periode 2000 sampai 2015 yang mencapai rata-rata sebesar 5,7 persen pertahun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tidak selamanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi sebaliknya, di tahun tertentu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara mengalami penurunan atau fluktuasi.

Pengeluaran pemerintah merupakan besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang dilakukan. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin yang pada pokoknya untuk tiga hal diantaranya untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta cicilan dan bunga hutang pemerintah baik dalam dan luar negeri. Pengeluaran pembangunan untuk proyek-proyek pembangunan yang ditangani oleh negara dimasukkan pada kelompok investasi.

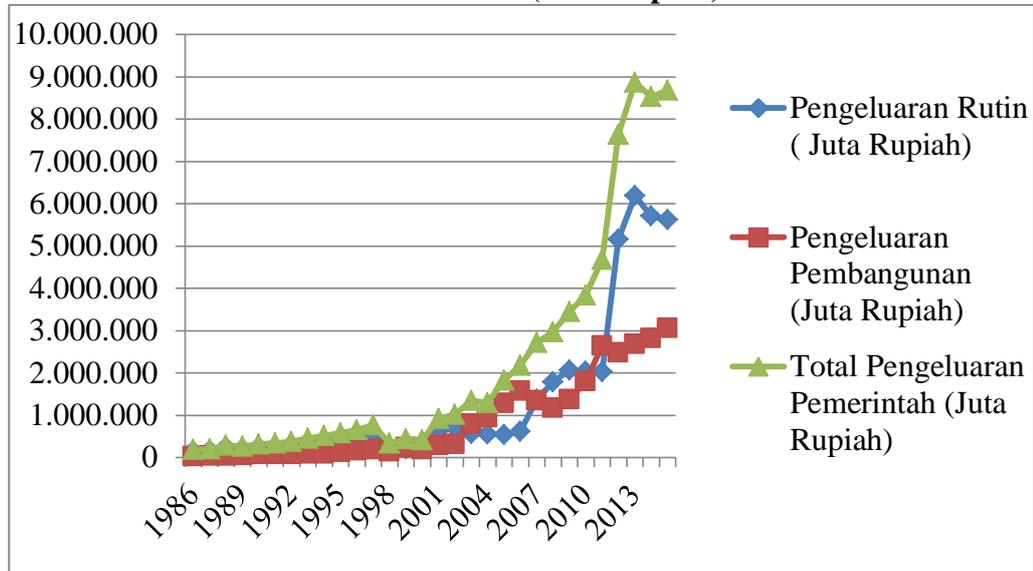
Pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara pada tahun 2015 sebesar Rp. 8,67 triliun. Pengeluaran pemerintah ini terdiri dari pengeluaran rutin sebesar Rp. 5,61 triliun dan pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 3,06 triliun. Perkembangan lebih lanjut mengenai pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Pengeluaran Pemerintah Di Sumatera Utara Tahun 1986-2015

Tahun	Pengeluaran Rutin (Juta Rupiah)	Pengeluaran Pembangunan (Juta Rupiah)	Total Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)	Laju Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (Persen)
1986	155.426	31.037	186.463	7,6
1987	168.852	36.348	205.200	10,0
1988	245.681	44.674	290.355	41,4
1989	208.674	58.476	267.150	-7,9
1990	240.400	73.500	313.900	17,4
1991	255.600	81.300	336.900	7,3
1992	299.000	84.200	383.200	13,7
1993	365.100	93.600	458.700	19,7
1994	422.100	93.500	515.600	12,4
1995	456.900	127.100	584.000	13,2
1996	491.500	169.300	660.800	13,1
1997	576.000	195.000	771.000	16,6
1998	200.800	141.800	342.600	-55,5
1999	202.200	246.800	449.000	31,0
2000	219.600	197.200	416.800	-7,1
2001	628.300	287.900	916.200	119,8
2002	703.400	317.900	1.021.300	11,4
2003	562.700	789.300	1.352.000	32,3
2004	551.700	949.800	1.501.500	11,0
2005	540.500	1.290.100	1.830.600	21,9
2006	613.700	1.570.900	2.184.600	19,3
2007	1.371.100	1.346.800	2.717.900	24,4
2008	1.794.400	1.172.900	2.967.300	9,1
2009	2.066.100	1.378.300	3.444.400	16,0
2010	2.037.700	1.795.400	3.833.100	11,2
2011	2.031.700	2.646.100	4.677.800	22,0
2012	5.159.000	2.474.500	7.633.500	63,1
2013	6.187.300	2.679.600	8.866.900	16,1
2014	5.706.300	2.819.000	8.525.300	-3,8
2015	5.619.300	3.060.000	8.679.300	1,8

Sumber: BPS Sumut, Data Diolah

Gambar 1.2
Pengeluaran Pemerintah Di Sumatera Utara
Tahun 1986-2015 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Sumut, Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 dan Gambar 1.2 di atas, terlihat bahwa total pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pada tahun 1986 mencapai Rp. 186.463.000.000. Pada tahun 1988 pengeluaran pemerintah naik menjadi Rp. 290.355.000.000 atau naik sebesar 41,4 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1989 pengeluaran pemerintah turun kembali menjadi 7,9 persen. Pada tahun 1997 meningkat menjadi Rp. 771.000.000.000. Pada tahun 1998 turun drastis menjadi Rp. 342.600.000 atau -55,5 persen disebabkan terjadinya krisis moneter. Pada tahun 1999 pengeluaran pemerintah naik menjadi Rp. 449.000.000.000 atau sebesar 31,0 persen dan pada tahun 2000, turun menjadi Rp. 416.800.000.000. pada tahun 2013 naik kembali menjadi Rp. 8.866.900.000.000 dan pada tahun 2014 turun kembali menjadi

Rp. 8.525.300.000.000. Pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 8.679.300.000.000.

Secara teori, Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara, hukum Wagner (*Wagner's Law*) menyatakan bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.²

Berdasarkan teori tersebut, di satu sisi pengeluaran pemerintah mempengaruhi perekonomian yang tentu saja berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain perekonomian yang meningkat atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong pengeluaran pemerintah.

Bertolak dari uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu perlu juga dilihat arah hubungan dan membuktikan ada tidaknya hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 1986-2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi identifikasi masalah adalah:

²Sigit Harjanto, “Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmiah*, Juli 2014, hlm. 5.

1. Dalam beberapa periode pertumbuhan ekonomi turun namun pengeluaran pemerintah meningkat.
2. Dalam beberapa periode pengeluaran pemerintah turun namun pertumbuhan ekonomi meningkat
3. Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran dan sekaligus membuat sasaran pembahasan menjadi lebih berfokus, maka peneliti membatasi pembahasan pada analisis kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 1986-2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: “Apakah pengeluaran pemerintah memiliki hubungan kausalitas dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 1986-2015 ?”

E. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi Operasional Variabel penelitian dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1	Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran (perbelanjaan) pemerintah atas barang-barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa.	1. Pengeluaran Rutin 2. Pengeluaran Pembangunan	Rasio

2	Pertumbuhan Ekonomi	Kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.	1. Produk Domestik Bruto 2. Produk Domestik Regional Bruto	Rasio
---	---------------------	---	---	-------

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk “Mengetahui dan menganalisis hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara Tahun 1986-2015”.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan dalam mengawasi pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi.

2. Bagi Peneliti

Sebagai bahan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dapat diterapkan di perkuliahan.

3. Bagi Dunia Akademik

Sebagai bahan untuk memperluas pemahaman dan wawasan mahasiswa/i terhadap teori yang diberikan dalam perkuliahan.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional variabel, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan perekonomian pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal.

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.¹

Definisi tersebut memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:²

- a. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang.

¹Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 99.

²M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 57.

- b. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk.
- c. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Sedangkan menurut Smith mengenai corak pertumbuhan ekonomi mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi, maka proses tersebut akan terus-menerus berlangsung secara kumulatif. Apabila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi dan yang belakangan ini akan menimbulkan kenaikan produktivitas. Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan perkembangan penduduk dari masa ke masa, yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan dalam pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak.³

Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi, yaitu:

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari pertumbuhan

³Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 244.

ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.⁴

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud.

Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan sangat rendah apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

⁴Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 433.

2. Teori Schumpeter

Teori pertumbuhan Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.⁵ Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan inovasi baru.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya mencapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary state*”. Akan tetapi berbeda dengan klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan klasik. Seperti yang telah diterangkan, menurut pandangan klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian

⁵*Ibid.*, hlm. 434.

telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

3. Teori Harrod-Domar

Dalam menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisahan-pemisahan berikut:⁶

- a) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh.
- b) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional.
- c) Rasio modal-produksi.
- d) Perekonomian terdiri dari dua sektor.

4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abrahm Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi.⁷

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:⁸

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali

⁶*Ibid.*, hlm. 436.

⁷*Ibid.*, hlm. 437.

⁸Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Op. Cit.*, hlm. 92.

dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi infrastruktur ekonomi dan sosial.

Di samping investasi yang bersifat langsung, banyak cara yang bersifat tidak langsung untuk menginvestasikan dana dalam berbagai jenis sumber daya. Pembangunan sistem irigasi akan dapat memperbaiki kualitas tanah pertanian serta meningkatkan produktivitas lahan pertaniannya.

Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif yang sama terhadap angka produksi, bahkan akan lebih besar lagi mengingat terus bertambahnya jumlah manusia. Logika konsep investasi dalam pembinaan sumber daya manusia dan penciptaan modal manusia (*human capital*) ini jelas dapat dianalogikan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya tanah melalui investasi strategis.

b. Pertumbuhan Penduduk Dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan

pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

Positif atau negatifnya laju pertumbuhan penduduk bagi upaya pembangunan ekonomi sepenuhnya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Adapun kemampuan ini lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Pengertian sederhananya, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Kemajuan teknologi yang netral (*netural technological progress*) terjadi apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dengan menggunakan jumlah dan kombinasi faktor input yang sama. Inovasi yang sederhana, seperti pembagian tenaga kerja yang dapat mendorong peningkatan output dan kenaikan konsumsi masyarakat adalah contohnya.

Kemajuan teknologi hemat modal (*capital-saving technological progress*) merupakan fenomena yang relatif langka. Hal ini dikarenakan hampir semua penelitian dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan di negara maju dengan tujuan utama untuk menghemat pekerja bukan menghemat modal.

Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan modal atau tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja (*labor-augmenting technological progress*) terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum.

Konsep yang berkaitan erat adalah tingkat pertumbuhan *output* per orang. Ini menentukan tingkat ketika standar-standar hidup negara naik. Pertumbuhan *output* per kapita karena menyebabkan peningkatan rata-rata pendapatan.⁹

b. Indikator Menghitung Pertumbuhan Ekonomi

1) Produk Domestik Bruto (PDB)

Dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa –jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Di dalam suatu perekonomian, di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang, barang dan jasa di produksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara, tetapi oleh penduduk negara lain.

⁹Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi, Tej* (Jakarta: Media Global Edukasi, 2004), hlm. 249.

Selain didapati produksi nasional diciptakan oleh faktor-faktor produksi yang berasal dari luar negeri. Produk domestik bruto atau dalam istilah Inggrisnya *Gross Domestic Product* (GDP), adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang di produksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing.¹⁰

Penghitungan nilai PDB dapat diartikan atas dua macam dasar harga yaitu:¹¹

- a. PDB atas dasar harga berlaku yaitu menggunakan harga berlaku dapat memberi hasil yang tidak akurat karena pengaruh inflasi.
- b. PDB atas dasar harga konstan yaitu memperoleh gambaran yang lebih akurat, karena menghilangkan pengaruh inflasi atau harga yang dianggap tidak berubah.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan 2000 dalam hal 1 tahun dinyatakan dalam satuan rupiah. Penghitungan PDRB diperoleh melalui tiga pendekatan :¹²

- a. Pendekatan produksi, pendekatan ini dapat dihasilkan melalui nilai produksi bruto dikurangi seluruh biaya antara biaya yang benar-

¹⁰Prathama Rahardja dan Mandala Mandurung, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 235.

¹¹*Ibid.*, hlm. 240.

¹²Septian Anhar Lubis, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 29.

benar habis pakai dalam proses produksi yang dikeluarkan untuk peningkatan output tersebut

- b. Pendekatan pengeluaran, merupakan penjumlahan semua komponen penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi.
- c. Pendekatan pendapatan, yaitu balas jasa yang diterima faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah, misalnya upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

c. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam

Perekonomian diindikasikan akan mengalami pertumbuhan, dengan cara meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, sektor produksi akan kembali bergairah dan pada akhirnya akan ada peningkatan *level of income*, sehingga tidak akan terdapat perbedaan atas target ekonomi yang ingin diraih oleh negara-negara maju dan berkembang. Namun, realitanya tidaklah demikian. Negara-negara maju berkonsentrasi untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang hanya terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan atau usaha untuk mengejar keterbelakangan dan pertumbuhan.

Menurut Gerld M. Meir, pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan sebuah upaya untuk meningkatkan *level of income* masyarakat dan individu dalam jangka panjang, yang diiringi dengan meminimalisasi tingkat kemiskinan dan menghindari kerusakan distribusi kekayaan masyarakat.¹³

¹³Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul, 2004), hlm. 138.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi dalam islam telah digambarkan dalam surah Nuh 10-12 sebagai berikut:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ
 السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
 وَتَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَتَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

Artinya: Maka aku katakan kepada mereka: Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.¹⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rizki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Hafalan* (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 570-571.

kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada Tuhannya, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, takwa dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa.¹⁵

2. Pengeluaran Pemerintah

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dalam perekonomian.¹⁶ Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional.¹⁷

Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan

¹⁵Said sa'ad Marthon, *Op. Cit.*, hlm. 140.

¹⁶Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹⁷Harry A. P. Sitaniapessy, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD", dalam *Jurnal Economia*, Volume 9, No. 1, April 2013, hlm. 40.

pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius.

Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat. Seterusnya pengeluaran agregat dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya maupun untuk menambah investasi pemerintah.¹⁸

Menurut Mangkoesubroto, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.¹⁹

Bagi Ibn Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangat penting. Sejumlah pengeluaran dibutuhkan untuk menciptakan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disediakan pemerintah, tidak mungkin dapat memiliki populasi yang tinggi. Pemerintah juga menjalankan fungsi pada sisi permintaan

¹⁸Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, hlm. 24.

¹⁹Guritno Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik Edisi Ketiga* (Yogyakarta: BPFEE, 2008), hlm. 169.

pasar. Dengan permintaannya, pemerintah dapat mendorong produksi. Jika pemerintah menghentikan pengeluarannya, krisis pasti akan terjadi.²⁰

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik konsumsi dan investasi bruto pemerintah, mencakup belanja semua tingkat pemerintahan barang dan jasa.²¹ Yang termasuk dalam golongan yang pertama (konsumsi pemerintah) adalah pembelian ke atas barang dan jasa yang akan dikonsumsi, seperti membayar gaji guru sekolah, membeli alat-alat tulis dan kertas untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan pemerintah. Sedangkan investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan irigasi, memberikan beasiswa, bantuan untuk korban banjir.²²

Pemerintah membeli barang terutama untuk kepentingan masyarakat dan pembelanjaan untuk mengembangkan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan pembayaran transfer kepada individu seperti tunjangan kesejahteraan untuk orang-orang miskin dan pembayaran jaminan sosial untuk kaum lansia. Pembayaran transfer tidak dilakukan dalam pertukaran dengan sebagian output barang dan jasa perekonomian. Karena itu, pembayaran transfer tidak termasuk dalam variabel G. Pembayaran transfer adalah lawan dari pajak: pembayaran transfer meningkat *disposable income* rumah tangga, sedangkan pajak mengurangi *disposable income*. Jadi, peningkatan

²⁰Mudrajad Kuncoro, *Masalah, kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 59.

²¹William A. McEachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 148.

²²Sadono, *Op. Cit.*, hlm. 26

pembayaran transfer didanai oleh peningkatan pajak sehingga *disposable income* tidak berubah.²³

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting di antaranya adalah: jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan.²⁴

- a. Proyeksi jumlah pajak yang diterima salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan yang akan dilakukan.
- b. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang

²³*Ibid.*, hlm. 62.

²⁴*Ibid.*, hlm. 169.

lambat, misalnya, pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur-irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan mengembangkan pendidikan. Usaha seperti itu memerlukan banyak uang dan pendapatan dari pajak saja tidak cukup untuk membiayainya. Maka, untuk memperoleh dana yang diperlukan pemerintah terpaksa meminjam atau mencetak uang.

- c. Pertimbangan politik dan keamanan dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

Untuk membiayai segala kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini ditinjau pengaturan keuangan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua kelompok besar:

- a. Pengeluaran rutin, seperti belanja pegawai (gaji, pensiun, uang makan, uang jalan), belanja barang (kertas, mobil, pemeliharaan

gedung), pembayaran bunga hutang (dalam negeri dan luar negeri), subsidi-subsidi, pengeluaran rutin lainnya.

- b. Pengeluaran Pembangunan yaitu yang tujuannya untuk memajukan kegiatan ekonomi di bidang industri, pertanian, perhubungan, kesehatan, pendidikan perluasan kesempatan kerja. Pengeluaran pembangunan sebagian besar digolongkan sebagai investasi dan dilaksanakan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan.

b. Dasar Teori Pengeluaran Pemerintah

1) Teori Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + (X - M)$ merupakan “sumber legitimasi” akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi yang sangat sederhana tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan terpekerjakan atau meningkat

pendapatannya. Pemerintah perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan pihak swasta.

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y diamati dari waktu ke waktu melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah (G) dapat meningkatkan perekonomian yang tentu saja berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Y).

2) Adolph Wagner

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Menurut Wagner dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Pengamatan empiris terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah :

- a) Tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan.
- b) Kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.
- c) Urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
- d) Perkembangan demokrasi.

e) Ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

3) Teori Rostow Dan Musgrave

Teori ini mengembangkan teori yang menghubungkan perkembangan pengeluaran dan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. Tahap menengah investasi pemerintah mulai menurun sedangkan investasi swasta sudah semakin membesar. Akan tetapi peranan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik masih sangat diperlukan. Pada tahap lanjut aktifitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktifitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan masyarakat.²⁵

4) Teori Peacock Dan Wiseman

Teori ini mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah mendasarkannya pada suatu analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori

²⁵Sirojuzilam, *Regional Pembangunan, Perencanaan Ekonomi* (Medan: USU Press, 2011), hlm. 9.

pemungutan suara (*voting*), bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak secara semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut Peacock, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, meskipun tarif pajaknya tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi, dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional menaikkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal terganggu karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh mengatasi penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar dapat menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*), efek ini menyatakan gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta digantikan oleh aktivitas pemerintah. Gangguan ini tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak, sehingga pemerintah harus meminjam dana luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar

bunga. Pengeluaran pemerintah kian membengkak karena kewajiban baru. Akibat lebih lanjut ialah pajak tidak turun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah selesai.

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian timbul efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Efek ini menyatakan, gangguan sosial menumbuhkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial. Keadaan ini menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga pemerintah peroleh penerimaan yang lebih besar pula.²⁶

c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:²⁷

- a. Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
- c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
- d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

²⁶Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 161-164.

²⁷Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: BPFE, 2003), hlm. 44.

Berdasarkan atas penilaian dapat dibedakan bermacam-macam pengeluaran negara seperti:²⁸

- a. Pengeluaran yang “*self-liquidating*” sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.
- b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan kesehatan masyarakat (*public health*) dan sebagainya.
- c. Pengeluaran yang tidak “*self-liquidating*” maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian *monument*, obyek-obyek *tourisme* dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.
- d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun

²⁸*Ibid.*, 45.

pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.

- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

d. Pengeluaran Pemerintah Dalam Islam

Keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara (*Government Expenditure*) dalam islam bersumber atas nama zakat, infak, shadaqah, jizyah yang terkumpul dalam Baitul Maal. Kebutuhan publik dalam ekonomi islam adalah kebutuhan darurat (urgen) bagi kemaslahatan bersama dalam kehidupan manusia.

Islam memecahkan problematika ekonomi dalam mendistribusikan harta dan jasa di tengah masyarakat, untuk menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah SWT mengingatkan betapa pentingnya dalam mendistribusikan harta dalam firman Allah QS. al- Hasyr ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمَا لَا

يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.²⁹

Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam islam, sebagai berikut:³⁰

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi intervensi pasar.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: J-ART, 2004), hlm. 546.

³⁰Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islam (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 189.

- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah tersebut yaitu:³¹

- a. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
- b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
- c. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang sahih seperti pada kasus “al-Hima”, yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketika Rasulullah menghususkan tanah untuk penggembalaan ternak kaum duafa, Rasulullah melarang ternak-ternak milik para ahgniya atau orang kaya

³¹*Ibid.*, hlm. 190.

untuk menggembala di sana. Bahkan Umar berkata: “hati-hati jangan sampai ternak Abdurrahman bin Auf mendekati lahan penggembalaan kaum dhuafa”.

- d. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
- e. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, di mulai dari yang wajib, Sunah dan mubah atau dhoruroh, hajiyyat dan kamaliyyah.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran peneliti dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dalam penelitian ini, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Nenti Simbolon Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia. (Skripsi)	a. Penerimaan Pajak b. Ekspor Bersih c. Inflasi d. Investasi e. PDB f. Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat g. Pengeluaran/ Belanja Pemerintah Indonesia	a. <i>Vector Autoregression (VAR)</i>	Berdasarkan penelitian dalam jangka pendek, variabel yang signifikan adalah ekspor Bersih dan PDB. Variabel yang signifikan dalam jangka

				panjang yaitu Nilai Tukar, Ekspor Bersih, Inflasi, PDB. Variabel yang signifikan dalam jangka pendek, signifikan juga dalam jangka panjang namun memiliki pengaruh yang berbeda yaitu Penerimaan Pajak memiliki hubungan positif, namun tidak signifikan terhadap Pengeluaran/ Belanja Pemerintah Indonesia
2	Andre Sapthu Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pemerintah Dan Petumbuhan Ekonomi Di Daerah Di Provinsi Maluku Tahun 1994-2009. (Jurnal)	a. Pendapatan Asli daerah b. Dana Transfer Pemerintah c. Petumbuhan Ekonomi	a. Menggunakan model <i>Granger Causality Test (Uji Kausalitas Granger)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil estimasi dengan uji kausalitas granger bahwa terjadi pola kausalitas arah dari pertumbuhan ekonomi ke pendapatan

				<p>asli daerah. Hal ini bahwa perubahan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) menyebabkan perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>
3	<p>Nurul Izzah</p> <p><i>Analisis Vector Autoregression (VAR) Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 1993-2013. (Jurnal)</i></p>	<p>a. Pengeluaran Pemerintah</p> <p>b. Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>a. Menggunakan model <i>Vector Autoregression (VAR)</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap perekonomian baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pengaruh pengeluaran pemerintah semakin besar dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, pengaruh variabel</p>

				tersebut baru muncul pada tahun kedua hingga jangka panjang dengan persentase yang sangat kecil.
4	Azwar Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Indonesia. (Artikel)	a. Pengadaan Barang Dan Jasa b. PDB Indonesia	a. Menggunakan model <i>Vector Autoregression</i> (VAR)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>shock</i> /perubahan nilai realisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia yang diukur dengan indikator pertumbuhan.
5	Rikwan E.S. Manik & Paidi Hidayat Analisis Kausalitas Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara. (Jurnal)	a. Pengeluaran Pemerintah b. Pertumbuhan Ekonomi	a. Menggunakan metode <i>Cointegration test</i> dan <i>Granger Causality Test</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di

				Sumatera Utara. Uji <i>Granger Causality</i> tidak ditemukan adanya hubungan timbal balik (kausal) antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, tetapi memiliki hubungan yang searah, yakni pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian.
--	--	--	--	--

Sumber: berbagai sumber

Persamaan dan perbedaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Nenti Simbolon	a. Variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah b. Metode penelitian menggunakan VAR	Perbedaan variabel pada penerimaan pajak, ekspor bersih, inflasi, investasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2	Andre Sapthu	a. Variabel yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi	a. Perbedaan variabel pada pendapatan

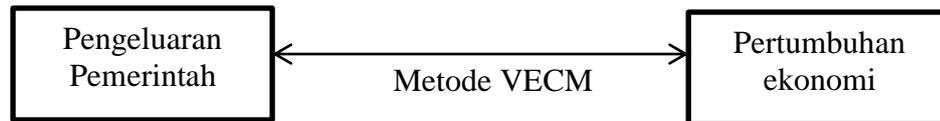
			asli daerah, dana transfer pemerintah. b. Metode Penelitian menggunakan <i>Causality Granger</i>
3	Nurul Izzah	a. Variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. b. Menggunakan metode VAR	a. Terletak pada waktu penelitiannya
4	Rikwan E.S. Manik & Paidi Hidayat	a. Variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.	a. Menggunakan metode <i>Cointegration test</i> dan <i>Granger Causality Test</i> .

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan yang diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memunculkan asumsi-asumsi yang berbentuk bagan alur pemikiran.³² Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal yang akan menopang pertumbuhan ekonomi. Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan menurut Wagner, tidak demikian. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah yang dilakukan tiap tahunnya. Lebih jelasnya dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

³²V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015), hlm. 66.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut koherensi, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari kenyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang akan dirumuskan akan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dari premis.³³

- a. H_0 = Tidak terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara Tahun 1986-2015.
- b. H_a = Terdapat hubungan kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara Tahun 1986-2015.

³³Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 76.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara dengan rentang waktu tahun 1986-2015. Penelitian dilakukan mulai bulan Februari sampai Mei tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan salah satu PDRB tertinggi di Indonesia yaitu Sumatera Utara periode 1986 sampai 2015. Sedangkan pemilihan tahun 1986 sampai 2015 sebagai rentang waktu penelitian didasarkan ketersediaan data.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.¹

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut kamus riset karangan Drs. Komaruddin, yang dimaksud dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Sedangkan sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.² Teknik pemilihan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik penarikan

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7.

²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 54-55.

sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.³

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Tahun
1	Data Provinsi di Sumatera Utara yang dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik	1986-2015
2	Data publikasi di link Badan Pusat Statistik yaitu <i>www.bps.go.id</i>	1986-2015

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 30 sampel mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 2015. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui website resmi yaitu *www.bps.go.id*.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data yang digunakan adalah data *time series* (runtun waktu). Data diperoleh melalui dokumentasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Secara rinci data yang dipergunakan pada variabel pengeluaran rutin

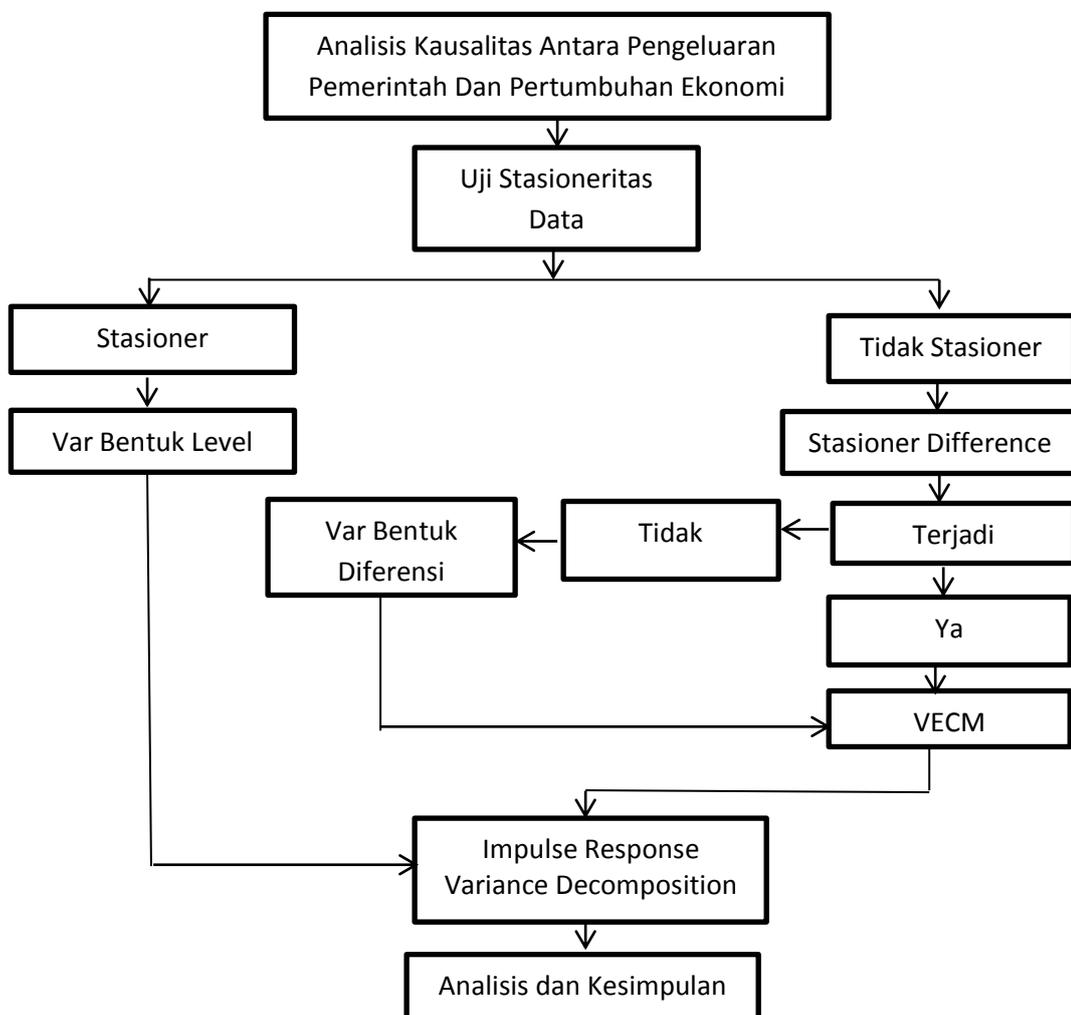
³Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 173.

dinyatakan dalam juta rupiah, variabel pengeluaran pembangunan dinyatakan dalam juta rupiah, variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dinyatakan dalam juta rupiah. Masing-masing variabel menggunakan data pertahun periode 1986-2015.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi komputer yaitu Eviews versi 9.

Gambar 3.1
Kerangka Pemilihan Model Estimasi Kausalitas



a. Uji Stasioneritas Data (*Unit Root Test*)

Metode uji stasioner data telah berkembang pesat seiring dengan perhatian para ahli ekonometrika terhadap ekonometrika *time series*. Metode akhir-akhir ini banyak digunakan oleh ahli ekonometrika untuk menguji masalah stasioner data adalah uji akar-akar unit (*unit root test*). Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey dan dikenal dengan uji akar unit Dickey-Fuller (DF).⁴

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + e_t \quad -1 \leq \rho \leq 1$$

Uji ini digunakan untuk membuktikan stabilitas (normalitas) pola masing-masing variabel, agar regresi yang dilakukan tidak lancung (palsu) sehingga tidak menghasilkan interpretasi yang keliru. Pengujian stasioneritas dilakukan dengan menggunakan metode ADF-test. Setiap variabel diuji secara berurutan, mulai dari derajat level dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Variabel tidak memiliki akar unit

H_a = Variabel memiliki akar unit

Ketika nilai *t-statistic ADF* lebih besar dari *critical value* maka H_0 ditolak atau menerima H_a variabel tidak memiliki akar unit. Data runtut waktu yang tidak memiliki akar unit berarti data telah stasioner. Data nilai kestasioner data juga dapat diketahui dari nilai probabilitas *Mac-Kinnon* dimana jika nilai prob. *Mac-Kinnon* kecil dari nilai derajat kepercayaan $\alpha = 1\%$, 5% atau 10% , maka H_0 ditolak dan sebaliknya.

⁴Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 355-356.

b. Uji *Lag*

Uji *lag* digunakan untuk mengetahui lamanya suatu variabel dipengaruhi oleh variabel masa lalunya. Uji lag sangat penting digunakan dalam model VAR untuk mendapatkan informasi yang akurat.⁵

c. Uji Kausalitas Granger

Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antar variabel yang diamati. Persamaan kausalitas Granger sebagai berikut:

$$Y_t = \sum_{i=1}^n \alpha_i Y_{t-i} + \sum_{i=1}^n \beta_i X_{t-i} + e$$

$$X_t = \sum_{i=1}^m \gamma_i X_{t-i} + \sum_{i=1}^m \nu_i Y_{t-i} + e$$

d. Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan apabila hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel stasioner pada *difference* yang sama (*first difference*) maka untuk menguji apakah model yang digunakan VAR atau *Vector Error Correction Model* (VECM), harus dilakukan uji kointegrasi terlebih dahulu. Jika tidak memiliki hubungan kointegrasi, maka estimasi VAR dapat dilakukan dalam bentuk VAR Indifference. Namun, jika pada data terdapat hubungan kointegrasi maka estimasi yang digunakan adalah VECM.⁶ Metode ini menggunakan *Johansen test*.

$$Y_t = A_1 Y_{t-1} + \dots + A_p Y_{t-p} + B X_t + \epsilon_t$$

Metode ini mensyaratkan untuk melakukan dua uji statistik yaitu dengan uji trace (*Trace test*), yaitu menguji hipotesis nol yang mensyaratkan

⁵Sigit Harjanto, "Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmiah*, Juli 2014, hlm. 7.

⁶Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia", dalam *Artikel Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 20, No. 2, Agustus 2016, hlm. 158.

jumlah dari arah kointegrasi adalah $< p$. Untuk dapat melihat hubungan kointegrasi tersebut dilihat dari rasio besarnya nilai Trace statistik dan *Max-Eigen* statistik dengan nilai critical value pada $\alpha = 5\%$.⁷

e. Model VECM (*Vector Error Correction Model*)

VECM, digunakan apabila data time series tidak stasioner pada tingkat level tetapi stasioner pada tingkat difference first dan terkointegrasi, sehingga menunjukkan adanya hubungan antara variabel. Model VECM dan model VAR hampir sama, bedanya dalam model VECM, menunjukkan datanya tidak stasioner pada tingkat level. Model VECM dalam penelitian ini yaitu:

$$\Delta Y = \beta_0 + \beta_1 \Delta X_t + \beta_2 EC_t + \varepsilon_t$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

X = Pengeluaran pemerintah

$ECT_t = (Y_{t-1} - \beta_0 - \beta_1 X_{t-1})$

f. *Impulse Response Function* (IRF)

IRF salah satu metode VAR yang digunakan untuk melihat perilaku suatu variabel dalam merespon suatu kejutan (*shock*). Analisis IRF mampu melacak respon dari variabel dalam model VAR akibat adanya perubahan di dalam variabel gangguan, selanjutnya dapat melihat lamanya pengaruh dari *shock* suatu variabel terhadap variabel lain hingga pengaruhnya hilang.

⁷Rozalinda, "Kausalitas Dan Kointegrasi Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kurun waktu 1983-2014", dalam *Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, Volume 19, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 270.

g. *Variance Decomposition*

Variance decomposition menyampaikan informasi berupa proporsi pergerakan secara berurutan sebagai akibat dari adanya guncangan sendiri dari variabel lain. Analisis VDC digunakan untuk mengukur berapa kontribusi atau komposisi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.⁸

⁸Azwar, *Op. Cit.*, hlm. 159.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Variabel

1. Pertumbuhan Ekonomi

Negara–negara sedang berkembang seperti Indonesia peranan pemerintah masih tergolong besar dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan sebuah negara, bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

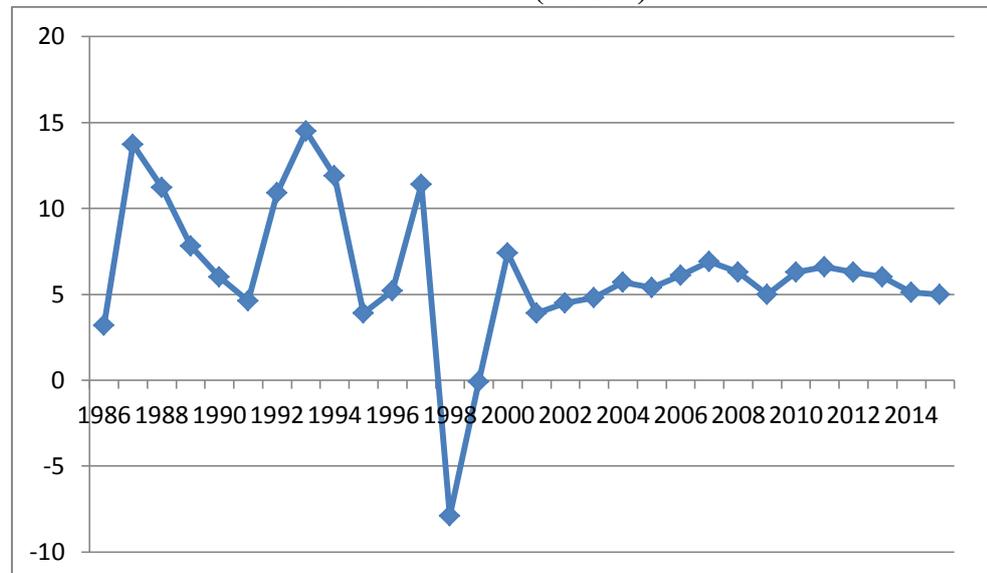
Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk wilayah, melalui atas dasar harga kostan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB, yaitu sejumlah produksi yang dihasilkan oleh setiap daerah dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam rupiah. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor lapangan usaha. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan gambar 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara
Tahun 1986-2015

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1986	26.665.409	3,2
1987	30.336.268	13,7
1988	33.761.169	11,2
1989	36.369.447	7,8
1990	38.582.281	6,0
1991	40.370.436	4,6
1992	44.791.379	10,9
1993	51.291.832	14,5
1994	57.430.761	11,9
1995	59.679.064	3,9
1996	62.807.524	5,2
1997	70.007.744	11,4
1998	64.411.614	-7,9
1999	64.330.882	-0,1
2000	69.154.112	7,4
2001	71.908.359	3,9
2002	75.189.140	4,5
2003	78.805.608	4,8
2004	83.328.948	5,7
2005	87.897.800	5,4
2006	93.347.400	6,1
2007	99.792.300	6,9
2008	106.172.600	6,3
2009	111.559.200	5,0
2010	118.640.000	6,3
2011	126.487.200	6,6
2012	134.463.900	6,3
2013	142.617.700	6,0
2014	149.989.100	5,1
2015	157.632.900	5,0

Sumber: BPS Sumut, Data Diolah

Gambar 4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara
Tahun 1986-2015 (Persen)



Sumber: BPS Sumut, Data Diolah

Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 di atas pertumbuhan ekonomi tahun 1986 sebesar 3,2 persen kemudian pada tahun 1987 meningkat menjadi 13,7 persen. Pada tahun 1991 turun menjadi 4,6 persen, diakibatkan pertumbuhan penduduk yang meningkat sehingga berpengaruh negatif akibat tidak terjadi keseimbangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pada tahun 1993 meningkat menjadi 14,5 persen dan pada tahun 1995 turun menjadi 3,9 persen, disebabkan meningkatnya harga bahan baku sehingga penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan. Pada periode 1996 sampai pertengahan 1997 sebelum terjadi krisis moneter pertumbuhan ekonomi menjadi 11,4 persen di Sumatera Utara didukung oleh ekspor yang meningkat. Pada periode pertengahan 1997 sampai 1998 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi minus 7,9 persen.

Krisis moneter di Sumatera Utara telah mengakibatkan inflasi sebesar 390,09 persen dan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja industri besar dan sedang. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setelah terjadinya krisis menjadi 7,4 persen akibat turunnya inflasi. Pada tahun 2001 terjadi penurunan kembali menjadi 3,9 persen, diakibatkan angka pengangguran yang tinggi di Sumatera Utara diantaranya berpendidikan tinggi. Pada sampai periode 2004 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,7 persen, didukung oleh peningkatan investasi di Sumatera Utara. Selanjutnya pada tahun 2005, terjadi penurunan kembali menjadi 5,4 persen, diakibatkan oleh tingkat pengangguran naik kembali, akibat partisipasi angkatan kerja menurun.

Pada sampai tahun 2007 tingkat pertumbuhan ekonomi naik kembali menjadi 6,9 persen, didukung oleh perkembangan pendapatan dan didorong oleh perkembangan jumlah uang beredar. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi turun kembali menjadi 5,0 persen, diindikasikan dampak krisis global yang terjadi pada tahun 2008 sehingga mengakibatkan kenaikan harga BBM. Selanjutnya, sampai pada tahun 2011 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,6 persen, didorong oleh pengeluaran pemerintah (konsumsi pemerintah) lebih mengedepankan kepada pelayanan publik. Pada periode selanjutnya terjadi penurunan kembali menjadi 5,0 persen, diakibatkan ekspor pertanian merosot di Sumatera Utara.

2. Pengeluaran Pemerintah

Merupakan kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah digunakan membiayai segala kegiatan pemerintah dalam menjalani suatu perekonomian dianggap yang paling penting untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah terbagi dua, diantaranya pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan dalam pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja subsidi. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik. Untuk mengetahui perkembangan pengeluaran pemerintah ekonomi di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.2 dan gambar 4.2 di bawah ini :

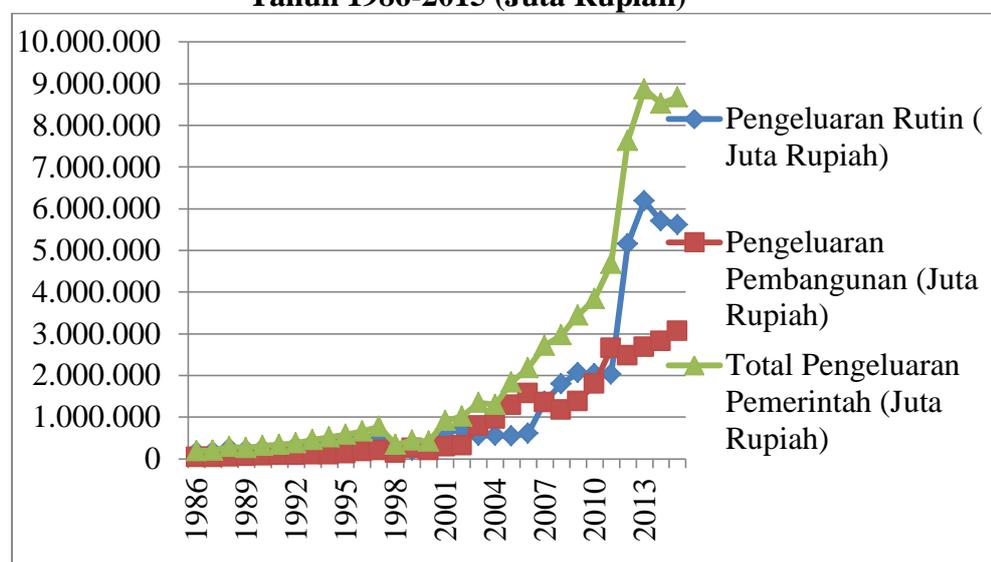
Tabel 4.2
Pengeluaran Pemerintah Di Sumatera Utara Tahun 1986-2015

Tahun	Pengeluara Rutin (Juta Rupiah)	Pengeluaran Pembangun an (Juta Rupiah)	Total Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)	Laju Perkembangan Pengeluaran Pemerintah (%)
1986	155.426	31.037	186.463	7,6
1987	168.852	36.348	205.200	10,0
1988	245.681	44.674	290.355	41,4
1989	208.674	58.476	267.150	-7,9
1990	240.400	73.500	313.900	17,4
1991	255.600	81.300	336.900	7,3
1992	299.000	84.200	383.200	13,7
1993	365.100	93.600	458.700	19,7
1994	422.100	93.500	515.600	12,4

1995	456.900	127.100	584.000	13,2
1996	491.500	169.300	660.800	13,1
1997	576.000	195.000	771.000	16,6
1998	200.800	141.800	342.600	-55,5
1999	202.200	246.800	449.000	31,0
2000	219.600	197.200	416.800	-7,1
2001	628.300	287.900	916.200	119,8
2002	703.400	317.900	1.021.300	11,4
2003	562.700	789.300	1.352.000	32,3
2004	551.700	949.800	1.501.500	11,0
2005	540.500	1.290.100	1.830.600	21,9
2006	613.700	1.570.900	2.184.600	19,3
2007	1.371.100	1.346.800	2.717.900	24,4
2008	1.794.400	1.172.900	2.967.300	9,1
2009	2.066.100	1.378.300	3.444.400	16,0
2010	2.037.700	1.795.400	3.833.100	11,2
2011	2.031.700	2.646.100	4.677.800	22,0
2012	5.159.000	2.474.500	7.633.500	63,1
2013	6.187.300	2.679.600	8.866.900	16,1
2014	5.706.300	2.819.000	8.525.300	-3,8
2015	5.619.300	3.060.000	8.679.300	1,8

Sumber: BPS Sumut, Data Diolah

Gambar 4.2
Pengeluaran Pemerintah di Sumatera Utara
Tahun 1986-2015 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Sumut, Data Diolah

Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 total pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran pemerintah untuk menjalani kegiatan pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai, berbagai macam subsidi. Sedangkan, pengeluaran pembangunan yaitu, dana yang digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan yang dilakukan.

Pada tahun 1986 mencapai Rp. 186.463.000.000. Pada tahun 1988 pengeluaran pemerintah naik menjadi Rp. 290.355.000.000 atau naik sebesar 41,4 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 1989 pengeluaran pemerintah turun sebesar -7,9 persen, diakibatkan oleh pengeluaran rutin turun menjadi Rp. 208.674.000.000. Pada tahun 1997 meningkat menjadi Rp. 771.000.000.000. Pada tahun 1998 turun drastis menjadi Rp. 342.600.000 atau -55,5 persen disebabkan pengeluaran rutin turun menjadi Rp. 200.800.000.000 dan pengeluaran pembangunan turun menjadi Rp. 141.800.000.000, diindikasikan krisis moneter yang terjadi yang menghambat pembangunan dalam perekonomian.

Pada tahun 1999 pengeluaran pemerintah naik menjadi Rp. 449.000.000.000 atau sebesar 31,0 persen dan pada tahun 2000, turun kembali sebesar Rp. 416.800.000.000, disebabkan pengeluaran pembangunan menurun menjadi Rp. 197.200.000.000, diindikasikan peningkatan belanja pegawai dalam mendukung administratif pemerintahan. Pada tahun 2013 naik kembali menjadi Rp. 8.866.900.000.000 dan pada tahun 2014 turun kembali menjadi Rp. 8.525.300.000.000, disebabkan

pengeluaran rutin turun menjadi Rp. 5.706.300.000.000, karena pelayanan publik ditingkatkan atau infrastruktur yaitu listrik dalam memfasilitasi industrialisasi. Pada tahun 2015 naik kembali sebesar Rp. 8.679.300.000.000.

B. Pemilihan Model Kausalitas

Dalam model kausalitas yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu model *Vector Autoregression* (VAR). Model ini diuji terlebih dahulu seperti uji stasioner, agar data tidak lancung atau palsu.

a. Uji Stasioneritas Data (*Unit Root Test*)

Uji ini digunakan untuk membuktikan stabilitas (normalitas) pola masing-masing variabel, agar regresi yang dilakukan tidak lancung (palsu) sehingga tidak menghasilkan interpretasi yang keliru. Pengujian stasioneritas dilakukan dengan menggunakan metode ADF-test. Setiap variabel diuji secara berurutan, mulai dari derajat level. Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H_0 = Variabel memiliki akar unit

H_a = Variabel tidak memiliki akar unit

Dasar penolakan terhadap terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan nilai probabilitas dengan taraf signifikan. Perbandingan dipakai apabila nilai probabilitas lebih kecil dari pada $\alpha = 1\%$, 5% , atau 10% maka H_a ditolak, begitu juga sebaliknya apabila nilai probabilitas lebih besar dari pada $\alpha = 1\%$, 5% , atau 10% , maka H_0

ditolak. Berikut adalah hasil uji stasioner data yang dilakukan dalam penelitian ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Stasioneritas Data (*Unit Root Test*)

Variabel	Nilai Kritis		Prob	Keterangan
G (Uji ADF- Level)	1%	-4.356068	1.0000	Tidak Stasioner
	5%	-3.595026		Tidak Stasioner
	10%	-3.233456		Tidak Stasioner
PDRB (Uji ADF- Level)	1%	-4.309824	0.9994	Tidak Stasioner
	5%	-3.574244		Tidak Stasioner
	10%	-3.221728		Tidak Stasioner
G (Uji ADF- <i>First</i> <i>Difference</i>)	1%	-4.339330	0.0053*	Stasioner
	5%	-3.587527		Stasioner
	10%	-3.229230		Stasioner
PDRB (Uji ADF- <i>First</i> <i>Difference</i>)	1%	-4.323979	0.0119*	Stasioner
	5%	-3.580623		Stasioner
	10%	-3.225334		Stasioner

Sumber : Data Diolah

Dari hasil pengolahan pada Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai dari pengeluaran pemerintah (G) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada tingkat level, nilai probabilitas lebih besar daripada $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% , dapat disimpulkan terjadi *unit root* atau data tidak stasioner pada tingkat level. Dengan demikian, pengujian dilanjutkan dengan uji integrasi kedua (tes kedua). Dari hasil pengolahan tersebut diketahui bahwa nilai dari pengeluaran pemerintah (G) dan pertumbuhan ekonomi (PDRB) pada tingkat *First Difference*, nilai probabilitas lebih kecil daripada $\alpha = 1\%$, 5% dan 10% . Hal ini berarti variabel tidak memiliki akar unit atau data penelitian ini bersifat stasioner pada tingkat *First Difference*. Tahap selanjutnya dilakukan uji pemilihan lag, untuk mengetahui tingkat

kelambanan dari variabel akibat adanya shock (guncangan) pada variabel, berikut ini.

b. Pemilihan *Lag*

Pemilihan *lag* digunakan dalam pendekatan VAR atau VECM, penting dilakukan karena berkaitan keakuratan informasi yang dihasilkan oleh estimasi model VAR. Pemilihan *lag* digunakan untuk mengetahui waktu yang diperlukan sebuah variabel dalam merespon perubahan yang terjadi pada variabel lainnya. Dalam pengujian panjang *lag* yang optimal dapat dimanfaatkan dari informasi yaitu dengan menggunakan *Akaike Information Criterion (AIC)*, *Schwarz Criterion (SC)* dan *Hanan-Quinn Criterion (HQ)*. Berikut adalah hasil pemilihan *lag* data yang dilakukan dalam penelitian ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Pemilihan *Lag*

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-952.7841	NA	1.42e+27	68.19887	68.29402	68.22796
1	-857.4157	170.3008*	2.09e+24*	61.67255*	61.95802*	61.75982*
2	-855.5113	3.128652	2.44e+24	61.82223	62.29802	61.96769

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa *lag* optimal dari beberapa kriteria. Jadi, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai *SC* pada *lag* 1 merupakan yang terkecil. Artinya, apabila terjadi guncangan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah, maka perlu waktu atau kelambanan data menjadi stasioner pada pertumbuhan ekonomi selama 1 tahun, begitu juga sebaliknya apabila terjadi guncangan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi, maka perlu waktu atau kelambanan data menjadi stasioner pada pengeluaran pemerintah selama 1 tahun. Setelah dilakukan pemilihan *lag*,

maka tahap selanjutnya uji kausalitas, untuk mengetahui ada hubungan antara variabel dua arah atau satu arah, berikut ini.

c. Uji Kausalitas Granger (*Granger Test*)

Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara variabel yang diamati, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah menggunakan metode *Granger Test*. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H_0 = Tidak ada pengaruh antara variabel

H_a = Ada pengaruh antara variabel

Dasar penolakan hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan nilai probabilitas F- statistik dengan $\alpha = 5\%$. Perbandingan dipakai apabila nilai probabilitas F- statistik lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak. Berikut adalah hasil uji kausalitas granger yang dilakukan dalam penelitian ini :

Tabel 4.5
Hasil Uji Kausalitas Granger (*Granger Test*)

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PDRB does not Granger Cause G	30	4.33154	0.0474
G does not Granger Cause PDRB		1.17544	0.2882

Sumber : Data Diolah

Dari hasil di atas diketahui tidak memiliki hubungan kausalitas (timbang balik) dan hanya menunjukkan hubungan yang searah yaitu pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *probability* yang signifikan pada $\alpha = 5\%$. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah, karena nilai *probability* yang lebih besar daripada $\alpha = 5\%$. Setelah mengetahui

adanya hubungan antara variabel, tahap selanjutnya dilakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang diantara variabel penelitian, berikut ini.

d. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan apabila hasil pengujian menunjukkan seluruh variabel stasioner pada *difference* yang sama. Uji kointegrasi dilakukan untuk melihat hubungan jangka panjang dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil estimasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk melihat hubungan keseimbangan jangka panjang. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H_0 = Tidak ada hubungan kointegrasi

H_a = Ada hubungan kointegrasi

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan nilai *trace statistic* dengan *critical value*. Perbandingan dipakai apabila nilai *trace statistic* lebih besar dari *critical value*, maka H_0 ditolak. Berikut adalah hasil uji kointegrasi data yang dilakukan dalam penelitian ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Kointegrasi

Hypothesized		Trace	0.05	
No. of CE(s)	Eigenvalue	Statistic	Critical Value	Prob.**
None	0.176307	9.962526	15.49471	0.2836
At most 1 *	0.149429	4.531719	3.841466	0.0333

Sumber : Data Diolah

Dari hasil di atas, diketahui bahwa nilai *trace statistik* lebih besar daripada *critical value*. Dapat disimpulkan nilai *trace statistik* lebih besar daripada *critical value*, maka H_0 ditolak, yang berarti ada hubungan kointegrasi (jangka panjang). Tahap selanjutnya yaitu pemilihan dalam model VAR, yaitu jika data stasioner pada tingkat level, maka model yang dipakai yaitu VAR biasa (*Unrestricted VAR*). Sebaliknya, jika data stasioner pada tingkat *difference* dan mempunyai hubungan jangka panjang maka model yang dipakai yaitu VECM (*Vector Error Correction Model*). Bahwa hasil dari Tabel 4.6 yang dilakukan dengan uji kointegrasi terdapat memiliki hubungan yang jangka panjang dan pada Tabel 4.3 uji stasioner yang dilakukan pada tingkat *First Difference*. Dapat disimpulkan model yang dipakai dalam VAR yaitu model VECM (*Vector Error Correction Model*), berikut ini.

e. VECM (*Vector Error Correction Model*)

Metode yang digunakan apabila data *time series* tidak stasioner pada tingkat level, tetapi pada tingkat *difference* dan memiliki hubungan yang jangka panjang. Dalam penelitian VECM (*Vector Error Correction Model*) menghasilkan informasi kecepatan penyesuaian dalam ketidakstabilan jangka panjang. Berikut adalah hasil uji VECM (*Vector Error Correction Model*).

Tabel 4.7
Hasil VECM (Vector Error Correction Model)

Varaiabel	Koefisien	T-Statistik
Jangka Pendek		
D(DG(-1))	0.421651	2.02069*
CointEq1	-0.210872	-2.23596*
Jangka Panjang		
DPDRB(-1)	-0.080807	-3.52174*

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada Tabel 4.7 untuk melihat pengaruh dan signifikansi dari hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi VECM menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan signifikan pada taraf 5 persen sebesar 0,421651 persen. Artinya, apabila terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1 persen maka akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,421651 persen. Hal ini sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

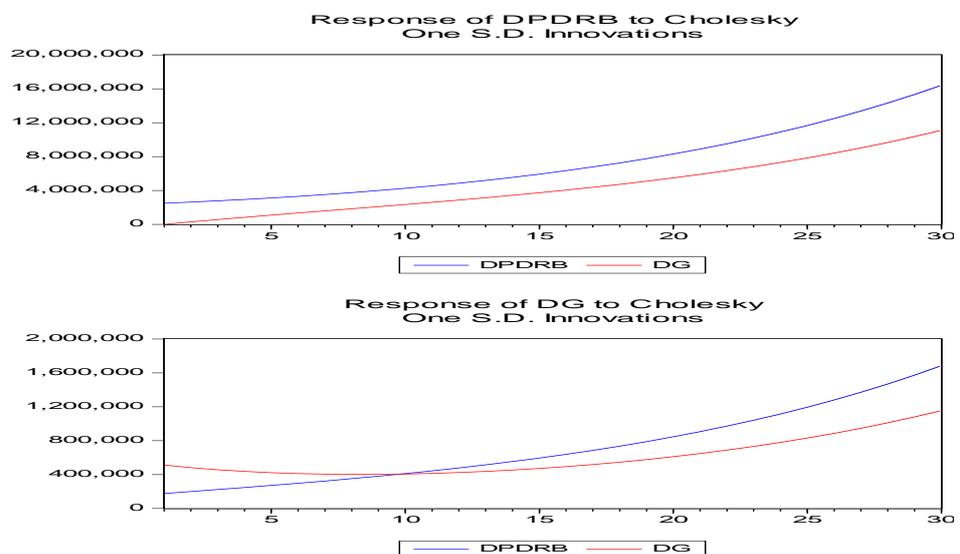
Pada Tabel 4.7 juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang terdapat satu variabel yaitu pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara statistik pada taraf 5 persen terhadap pengeluaran pemerintah. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang dengan taraf 5 persen sebesar -0.080807 persen. Artinya apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan pengeluaran pemerintah sebesar -0.080807 persen. Hal ini sesuai

dengan teori Wagner yang menyatakan bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah begitu juga sebaliknya, bahwa menurunnya perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah menguji adanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang, maka perlu dilakukan uji IRF. Uji IRF dilakukan untuk melihat respon akibat adanya gangguan baik dari variabel lain atau variabel gangguan. Hasil uji IRF sebagai berikut.

f. *Impulse Response Function (IRF)*

IRF salah satu metode VAR yang digunakan untuk melihat perilaku suatu variabel dalam merespon suatu kejutan (*shock*). Analisis IRF mampu melacak respon dari variabel dalam model VAR akibat adanya perubahan di dalam variabel gangguan, selanjutnya dapat melihat lamanya pengaruh dari *shock* suatu variabel terhadap variabel lain hingga pengaruhnya hilang.

Gambar 4.3
Hasil *Impulse Response Function (IRF)*



Sumber : Data Diolah

1. *Response Function of DPDRB*

Hasil *response function* menunjukkan bahwa perubahan variabel DPDRB dalam merespons adanya shock variabel DG. Respons pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek (tahun ke-1) yaitu mendekati nol. Dalam jangka menengah (tahun ke-15) pertumbuhan ekonomi direspon positif atau mengalami kenaikan dan dalam jangka panjang (tahun ke-30).

2. *Response Function of DG*

Hasil *response function* menunjukkan bahwa perubahan variabel DG dalam merespons adanya shock variabel DPDRB. Respons pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (tahun ke-1) mengalami positif, disusul tahun berikutnya respon mengalami penurunan. Pada tahap menengah (tahun ke-15) respon pengeluaran pemerintah naik kembali atau positif sampai pada tahap jangka panjang (tahun ke-30) respon yang diterima mengalami positif. Tahap berikutnya yaitu dengan melakukan uji *Variance decomposition*, untuk mengetahui nilai kontribusi akibat adanya guncangan sendiri dari variabel lain, berikut ini.

g. *Variance Decomposition (VDC)*

Variance decomposition menyampaikan informasi berupa proporsi pergerakan secara berurutan sebagai akibat dari adanya guncangan sendiri dari variabel lain. Analisis VDC digunakan untuk mengukur berapa

kontribusi atau komposisi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 4.8
Hasil Variance Decomposition

Variance Decomposition of DG				Variance Decomposition of PDRB	
Period	S.E.	DG	DPDRB	DG	DPDRB
1	542036.7	100.0000	0.000000	10.66509	89.33491
2	752214.7	99.82315	0.176850	14.70975	85.29025
3	907935.3	99.41557	0.584433	18.91734	81.08266
4	1037532.	98.78687	1.213127	23.09785	76.90215
5	1152603.	97.95225	2.047754	27.12122	72.87878
6	1259429.	96.93139	3.068608	30.90690	69.09310
7	1361959.	95.74744	4.252560	34.41162	65.58838
8	1462928.	94.42582	5.574185	37.61845	62.38155
9	1564376.	92.99317	7.006826	40.52788	59.47212
10	1667920.	91.47642	8.523580	43.15124	56.84876
11	1774901.	89.90184	10.09816	45.50605	54.49395
12	1886487.	88.29441	11.70559	47.61286	52.38714
13	2003732.	86.67719	13.32281	49.49327	50.50673
14	2127615.	85.07092	14.92908	51.16862	48.83138
15	2259075.	83.49374	16.50626	52.65929	47.34071
16	2399029.	81.96104	18.03896	53.98430	46.01570
17	2548387.	80.48543	19.51457	55.16113	44.83887
18	2708069.	79.07682	20.92318	56.20567	43.79433
19	2879016.	77.74253	22.25747	57.13230	42.86770
20	3062194.	76.48758	23.51242	57.95394	42.04606
21	3258608.	75.31485	24.68515	58.68216	41.31784
22	3469305.	74.22544	25.77456	59.32730	40.67270
23	3695386.	73.21889	26.78111	59.89863	40.10137
24	3938009.	72.29351	27.70649	60.40437	39.59563
25	4198397.	71.44658	28.55342	60.85187	39.14813
26	4477849.	70.67468	29.32532	61.24768	38.75232
27	4777740.	69.97379	30.02621	61.59761	38.40239
28	5099535.	69.33958	30.66042	61.90686	38.09314
29	5444793.	68.76750	31.23250	62.18003	37.81997
30	5815178.	68.25294	31.74706	62.42123	37.57877

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil analisis di atas, yaitu :

1. *Variance decomposition* dari variabel pengeluaran pemerintah

Pada variabel pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek (tahun ke-1) dipengaruhi oleh variabel itu sendiri sebesar 100 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak merespon. Dalam jangka menengah (tahun ke-15) perubahan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 83,49374 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 16,50626 persen. Dalam jangka panjang (tahun ke-30) perubahan pada pengeluaran pemerintah dan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 68,25294 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 31,74706 persen.

2. *Variance decomposition* dari variabel pertumbuhan ekonomi.

Pada variabel pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (tahun ke-1) dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebesar memberikan pengaruhnya sebesar 89,33491 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah merespon sebesar 10,66509 persen. Dalam jangka menengah (tahun ke-15) perubahan pada pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebesar 47,34071 persen dan pengeluaran pemerintah sebesar 52,65929. Dalam jangka panjang (tahun ke-30) perubahan pada pertumbuhan ekonomi oleh pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebesar 37,57877 persen dan pengeluaran pemerintah sebesar 62,42123 persen.

C. Pembahasan

1. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara

Dari hasil Kausalitas Granger (*Granger Causality*) di peroleh tidak memiliki hubungan kausalitas (timbang balik) dan hanya menunjukkan hubungan yang searah yaitu pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *probability* yang signifikan pada $\alpha = 5\%$. Hal ini sejalan dengan teori Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil VECM diketahui pada jangka pendek yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan. Hasil estimasi VECM menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah signifikan pada taraf 5 persen sebesar 0,421651 persen. Menurut teori, Keynes menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil *response function* menunjukkan bahwa perubahan variabel DG dalam merespons adanya shock variabel DPDRB. Respons pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (tahun ke-1) mengalami positif, disusul tahun berikutnya respon mengalami penurunan. Pada tahap menengah (tahun ke-15) respon pengeluaran pemerintah naik kembali atau positif sampai pada tahap jangka panjang (tahun ke-30) respon yang diterima mengalami positif. Tahap berikutnya yaitu dengan melakukan uji *Variance decomposition*, untuk mengetahui

nilai kontribusi akibat adanya guncangan sendiri dari variabel lain, berikut ini.

Hasil *Variance decomposition* dari variabel pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek (tahun ke-1) dipengaruhi oleh variabel itu sendiri sebesar 100 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak merespon. Dalam jangka menengah (tahun ke-15) perubahan pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 83,49374 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 16,50626 persen. Dalam jangka panjang (tahun ke-30) perubahan pada pengeluaran pemerintah dan dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah itu sendiri sebesar 68,25294 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 31,74706 persen.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rikwan E.S. Manik. Uji yang digunakan yaitu uji *Granger Causality* antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2000-2006 menyatakan bahwa, hanya memiliki hubungan yang searah, yaitu pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

2. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Di Sumatera Utara

Dari hasil Kausalitas Granger (*Granger Causality*) diperoleh pertumbuhan ekonomi tidak signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probability yang tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$. Secara teori, Wagner yang menyatakan bahwa peningkatan

perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil VECM diketahui pada jangka panjang pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan dengan taraf 5 persen sebesar -0.080807 persen. Hal ini diindikasikan dalam mengelola keuangan lebih mengedepankan tujuan daripada memperbaiki, misalnya dalam penuntasan kemiskinan. Menurut teori, Wagner yang menyatakan bahwa peningkatan perekonomian yang terjadi mempengaruhi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Hasil *response function* menunjukkan bahwa perubahan variabel DPDRB dalam merespons adanya shock variabel DG. Respons pertumbuhan ekonomi terhadap pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek (tahun ke-1) yaitu mendekati nol. Dalam jangka menengah (tahun ke-15) pertumbuhan ekonomi direspons positif atau mengalami kenaikan dan dalam jangka panjang (tahun ke-30).

Variance decomposition dari variabel pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek (tahun ke-1) dijelaskan oleh pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebesar memberikan pengaruhnya sebesar 89,33491 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah merespon sebesar 10,66509 persen. Dalam jangka menengah (tahun ke-15) perubahan pada pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebesar 47,34071 persen dan pengeluaran pemerintah sebesar 52,65929. Dalam jangka panjang (tahun ke-30) perubahan pada pertumbuhan ekonomi oleh

pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebesar 37,57877 persen dan pengeluaran pemerintah sebesar 62,42123 persen.

Hal ini sesuai yang diteliti oleh Andre Sapthu. Hasil yang diperoleh bahwa hanya terdapat hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli yang daerah yang menentukan kepada pengeluaran pemerintah yang dilakukan.

3. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Kajian Ekonomi Islam

Menurut Ibn Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangat penting. Sejumlah pengeluaran dibutuhkan untuk menciptakan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi. Tanpa infrastruktur yang disediakan pemerintah, tidak mungkin dapat memiliki populasi yang tinggi. Pemerintah juga menjalankan fungsi pada sisi permintaan pasar. Dengan permintaannya, pemerintah dapat mendorong produksi. Jika pemerintah menghentikan pengeluarannya, krisis pasti akan terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Artinya, pengeluaran pemerintah yang meningkat, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori Ibn Khaldun yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam perekonomian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan tentang analisis kausalitas antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan searah antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Variabel pengeluaran pemerintah secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
2. Hasil *Vector Error Correction Model* (VECM), menunjukkan dalam jangka pendek variabel yang signifikan adalah pengeluaran pemerintah. Sedangkan, dalam jangka panjang variabel yang signifikan adalah pertumbuhan ekonomi, tetapi berpengaruh negatif.
3. Hasil *Impulse Response Function* (IRF), menunjukkan bahwa jika terjadi guncangan diberikan pada pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi akan memberikan respon yang sangat kecil atau mendekati nol. Sedangkan, jika terjadi guncangan pada pertumbuhan ekonomi, maka pengeluaran pemerintah akan memberikan respon yang positif terhadap variabel pengeluaran pemerintah.
4. Hasil *Variance Decomposition* (VDC), dalam penelitian ini menunjukkan pengeluaran pemerintah terhadap *shock* yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi antara 10,6 persen sampai 62,4 persen. Sedangkan, pertumbuhan

ekonomi terhadap *shock* yang terjadi pada pengeluaran pemerintah antara 0 persen sampai 31,7 persen.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi signifikan dalam jangka panjang, tetapi berpengaruh negatif. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang lebih mengedepankan kesejahteraan publik atau masyarakat dalam rangka penyusunan anggaran yang optimal atau produktif.
2. Pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek berpengaruh signifikan. Oleh karena itu, dalam belanja pemerintah lebih ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian selanjutnya yang tertarik dalam kajian yang sama dapat menambah jumlah populasi penelitian, menambah jumlah variabel serta metode analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono, *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
- Andre Sapthu, “Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Provinsi Maluku Tahun 1994-2009”, dalam *Jurnal Ekonomi*, Volume 4, No. 2, Desember 2010.
- Azwar, “Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia”, dalam *Artikel Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, Volume 20, No. 2, Agustus 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: J-ART, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Dan Terjemahnya* Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*, Yogyakarta: BPFEE, 2008.
- Harry A. P. Sitaniapessy, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD”, dalam *Jurnal Economia*, Volume 9, No. 1, April 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.
- Mudrajad Kuncoro, *Masalah, kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nenti Simbolon, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Indonesia, *Skripsi*, Desember 2012.

- Nurul Izzah, “Analisis *Vector Autoregression* (VAR) Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 1993-2013”, *Jurnal*, Volume 3, No. 2, Desember 2015.
- Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Rozalinda, “Kausalitas Dan Kointegrasi Antara Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kurun waktu 1983-2104”, *dalam Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, Volume 19, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Ilmu Makroekonomi, Tej*, Jakarta: Media Global Edukasi, 2004.
- Prathama Rahardja dan Mandala Mandurung, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 235.
- Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul, 2004.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Septian Anhar Lubis, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Sigit Harjanto, “Analisis Hubungan Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Di Indonesia”, *dalam Jurnal Ilmiah*, Juli 2014.
- Sirojuzilam, *Regional Pembangunan, Perencanaan Ekonomi*, Medan: USU Press, 2011.
- Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFE, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2015.
- William A. McEachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ismayani Nasution
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Padangsidempuan, 28 November 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. PMD. Sigiring-Giring, Padangsidempuan
Telepon/No. HP : 0857 6523 7511/0812 6099 6361
E-mail : ismayani281194@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Iskandar Z Nasution
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Ermawati Pane
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2007 : SD Negeri 200110 Padangsidempuan
Tahun 2007-2010 : MTs YPKS Padangsidempuan
Tahun 2010-2013 : SMK N 3 Padangsididmpuan
Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Lampiran 1

DAFTAR DATA PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA

Tahun	Pengeluaran Pemerintah		Total (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)
	Rutin (Juta Rupiah)	Pembangunan (Juta Rupiah)		
1986	155.426	31.037	186.463	26.665.409
1987	168.852	36.348	205.200	30.336.268
1988	245.681	44.674	290.355	33.761.169
1989	208.674	58.476	267.150	36.369.447
1990	240.400	73.500	313.900	38.582.281
1991	255.600	81.300	336.900	40.370.436
1992	299.000	84.200	383.200	44.791.379
1993	365.100	93.600	458.700	51.291.832
1994	422.100	93.500	515.600	57.430.761
1995	456.900	127.100	584.000	59.679.064
1996	491.500	169.300	660.800	62.807.524
1997	576.000	195.000	771.000	70.007.744
1998	200.800	141.800	342.600	64.411.614
1999	202.200	246.800	449.000	64.330.882
2000	219.600	197.200	416.800	69.154.112
2001	628.300	287.900	916.200	71.908.359
2002	703.400	317.900	1.021.300	75.189.140
2003	562.700	789.300	1.352.000	78.805.608
2004	551.700	949.800	1.501.500	83.328.948
2005	540.500	1.290.100	1.830.600	87.897.800
2006	613.700	1.570.900	2.184.600	93.347.400
2007	1.371.100	1.346.800	2.717.900	99.792.300
2008	1.794.400	1.172.900	2.967.300	106.172.600
2009	2.066.100	1.378.300	3.444.400	111.559.200
2010	2.037.700	1.795.400	3.833.100	118.640.000
2011	2.031.700	2.646.100	4.677.800	126.487.200
2012	5.159.000	2.474.500	7.633.500	134.463.900
2013	6.187.300	2.679.600	8.866.900	142.617.700
2014	5.706.300	2.819.000	8.525.300	149.989.100
2015	5.619.300	3.060.000	8.679.300	157.632.900

Lampiran 2

Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*) Pengeluaran Pemerintah Tingkat Level

Null Hypothesis: PRPP has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	2.776106	1.0000
Test critical values: 1% level	-4.356068	
5% level	-3.595026	
10% level	-3.233456	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PRPP)

Method: Least Squares

Date: 04/24/17 Time: 19:48

Sample (adjusted): 1990 2015

Included observations: 26 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PRPP(-1)	0.653328	0.235340	2.776106	0.0117
D(PRPP(-1))	-0.626946	0.378092	-1.658185	0.1129
D(PRPP(-2))	-1.408359	0.388564	-3.624526	0.0017
D(PRPP(-3))	-1.314343	0.487823	-2.694303	0.0140
C	-221684.8	274809.3	-0.806686	0.4293
@TREND("1986")	9566.755	24902.70	0.384165	0.7049
R-squared	0.578875	Mean dependent var	323544.2	
Adjusted R-squared	0.473594	S.D. dependent var	631606.4	
S.E. of regression	458254.7	Akaike info criterion	29.10741	
Sum squared resid	4.20E+12	Schwarz criterion	29.39774	
Log likelihood	-372.3964	Hannan-Quinn criter.	29.19102	
F-statistic	5.498369	Durbin-Watson stat	2.183214	
Prob(F-statistic)	0.002416			

Lampiran 3

Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*) Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Level

Null Hypothesis: PE has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	0.722688	0.9994
Test critical values: 1% level	-4.309824	
5% level	-3.574244	
10% level	-3.221728	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PE)

Method: Least Squares

Date: 04/01/17 Time: 08:18

Sample (adjusted): 1987 2015

Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE(-1)	0.047474	0.065691	0.722688	0.4763
C	941720.0	1455440.	0.647035	0.5233
@TREND("1986")	-5101.487	269642.8	-0.018919	0.9850
R-squared	0.307894	Mean dependent var		4516120.
Adjusted R-squared	0.254655	S.D. dependent var		2913712.
S.E. of regression	2515505.	Akaike info criterion		32.41154
Sum squared resid	1.65E+14	Schwarz criterion		32.55299
Log likelihood	-466.9674	Hannan-Quinn criter.		32.45584
F-statistic	5.783253	Durbin-Watson stat		1.752170
Prob(F-statistic)	0.008361			

Lampiran 4

Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*) Pengeluaran Pemerintah Tingkat *First Difference*

Null Hypothesis: D(PRPP) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.620929	0.0053
Test critical values: 1% level	-4.339330	
5% level	-3.587527	
10% level	-3.229230	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PRPP,2)

Method: Least Squares

Date: 04/04/17 Time: 09:30

Sample (adjusted): 1989 2015

Included observations: 27 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PRPP(-1))	-1.180421	0.255451	-4.620929	0.0001
D(PRPP(-1),2)	0.508490	0.208388	2.440115	0.0228
C	-387413.7	244524.5	-1.584356	0.1268
@TREND("1986")	47531.16	16866.08	2.818152	0.0098
R-squared	0.494654	Mean dependent var		2549.815
Adjusted R-squared	0.428739	S.D. dependent var		670800.3
S.E. of regression	507002.9	Akaike info criterion		29.24637

Sum squared resid	5.91E+12	Schwarz criterion	29.43835
Log likelihood	-390.8261	Hannan-Quinn criter.	29.30346
F-statistic	7.504453	Durbin-Watson stat	2.082729
Prob(F-statistic)	0.001127		

Null Hypothesis: D(PE) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

Lampiran 5

Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*) Pertumbuhan Ekonomi Tingkat *First Difference*

Null Hypothesis: D(PE) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.248187	0.0119
Test critical values: 1% level	-4.323979	
5% level	-3.580623	
10% level	-3.225334	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PE,2)
Method: Least Squares
Date: 04/04/17 Time: 09:29
Sample (adjusted): 1988 2015
Included observations: 28 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PE(-1))	-0.828786	0.195092	-4.248187	0.0003
C	1181959.	1078291.	1.096141	0.2835
@TREND("1986")	168403.4	68855.23	2.445760	0.0218

R-squared	0.420507	Mean dependent var	141890.8
Adjusted R-squared	0.374147	S.D. dependent var	3191645.
S.E. of regression	2524938.	Akaike info criterion	32.42229
Sum squared resid	1.59E+14	Schwarz criterion	32.56502
Log likelihood	-450.9120	Hannan-Quinn criter.	32.46592
F-statistic	9.070564	Durbin-Watson stat	1.991943

Lampiran 6

Hasil Uji Penentuan *Lag*

VAR Lag Order Selection

Criteria

Endogenous variables: PRPP

PE

Exogenous variables: C

Date: 04/04/17 Time: 09:34

Sample: 1986

2015

Included observations: 28

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-952.7841	NA	1.42e+27	68.19887	68.29402	68.22796 61.7598
1	-857.4157	170.3008*	2.09e+24*	61.67255*	61.95802*	2*
2	-855.5113	3.128652	2.44e+24	61.82223	62.29802	61.96769

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Lampiran 7

Hasil Uji Granger Causality

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 04/04/17 Time: 09:35

Sample: 1986 2015

Lags: 1

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
PE does not Granger Cause PRPP	30	4.33154	0.0474
PRPP does not Granger Cause PE		1.17544	0.2882

Lampiran 8

Hasil Uji VECM (*Vector Error Correction Model*)

Vector Error Correction Estimates

Date: 04/24/17 Time: 20:02

Sample (adjusted): 1989 2015

Included observations: 27 after adjustments

Standard errors in () & t-statistics in []

Cointegrating Eq:	CointEq1
DG(-1)	1.000000
DPDRB(-1)	-0.080807 (0.02295) [-3.52174]
C	4333252.

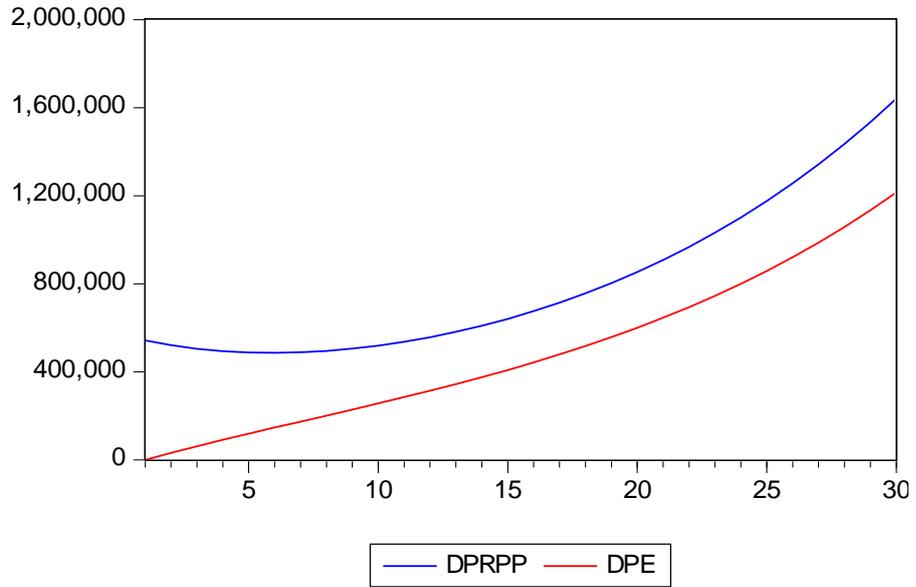
Error Correction:	D(DG)	D(DPDRB)
CointEq1	-0.210872	-0.345621

	(0.09431)	(0.46939)
	[-2.23596]	[-0.73633]
D(DG(-1))	0.421651	2.019813
	(0.20867)	(1.03855)
	[2.02069]	[1.94484]
D(DPDRB(-1))	0.015795	0.142048
	(0.04425)	(0.22021)
	[0.35699]	[0.64505]
C	104758.8	3172193.
	(192534.)	(958259.)
	[0.54410]	[3.31037]
R-squared	0.340267	0.271853
Adj. R-squared	0.254215	0.176878
Sum sq. resids	6.67E+12	1.65E+14
S.E. equation	538648.1	2680895.
F-statistic	3.954191	2.862346
Log likelihood	-392.4608	-435.7916
Akaike AIC	29.36747	32.57715
Schwarz SC	29.55944	32.76913
Mean dependent	308151.9	4431586.
S.D. dependent	623732.2	2954932.
Determinant resid covariance (dof adj.)		1.90E+24
Determinant resid covariance		1.38E+24
Log likelihood		-826.9738
Akaike information criterion		61.99806
Schwarz criterion		62.47800

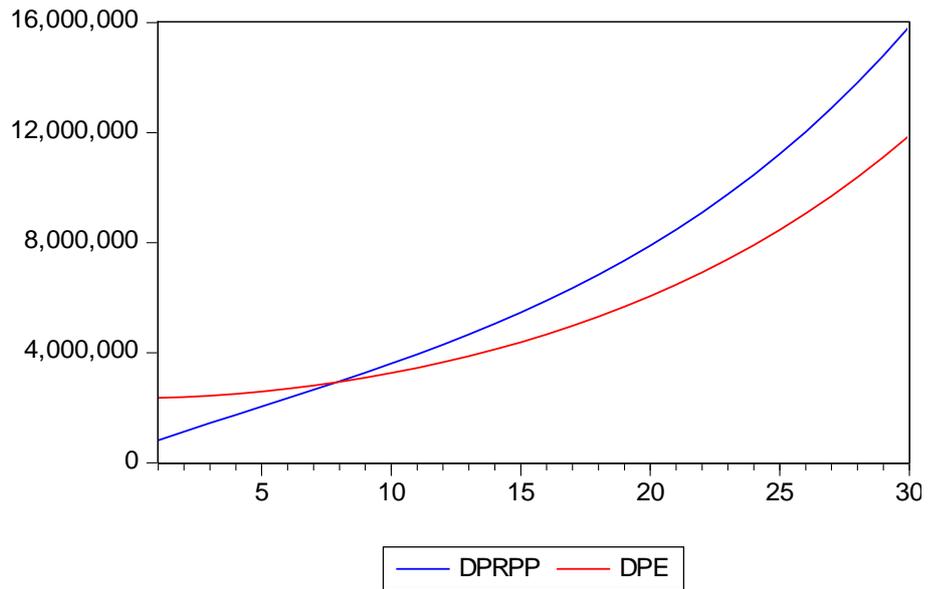
Lampiran 9

Hasil Uji IRF (*Impulse Response Function*)

Response of DPRPP to Cholesky
One S.D. Innovations



Response of DPE to Cholesky
One S.D. Innovations



Lampiran 10

Hasil Uji VD (*Variance Decomposition*)

Varia

nce
Deco
mposi
tion of
DPRP
P:

Perio d	S.E.	DPRPP	DPE
1	542036.7	100.0000	0.000000
2	752214.7	99.82315	0.176850
3	907935.3	99.41557	0.584433
4	1037532.	98.78687	1.213127
5	1152603.	97.95225	2.047754
6	1259429.	96.93139	3.068608
7	1361959.	95.74744	4.252560
8	1462928.	94.42582	5.574185
9	1564376.	92.99317	7.006826
10	1667920.	91.47642	8.523580
11	1774901.	89.90184	10.09816
12	1886487.	88.29441	11.70559
13	2003732.	86.67719	13.32281
14	2127615.	85.07092	14.92908
15	2259075.	83.49374	16.50626
16	2399029.	81.96104	18.03896
17	2548387.	80.48543	19.51457
18	2708069.	79.07682	20.92318
19	2879016.	77.74253	22.25747
20	3062194.	76.48758	23.51242
21	3258608.	75.31485	24.68515
22	3469305.	74.22544	25.77456
23	3695386.	73.21889	26.78111
24	3938009.	72.29351	27.70649
25	4198397.	71.44658	28.55342
26	4477849.	70.67468	29.32532
27	4777740.	69.97379	30.02621
28	5099535.	69.33958	30.66042
29	5444793.	68.76750	31.23250
30	5815178.	68.25294	31.74706

Varia
nce
Deco
mposi
tion of
DPE:

Perio d	S.E.	DPRPP	DPE
------------	------	-------	-----

d

1	2495641.	10.66509	89.33491
2	3635287.	14.70975	85.29025
3	4607428.	18.91734	81.08266
4	5525624.	23.09785	76.90215
5	6434267.	27.12122	72.87878
6	7356484.	30.90690	69.09310
7	8306496.	34.41162	65.58838
8	9294214.	37.61845	62.38155
9	10327318	40.52788	59.47212
10	11412320	43.15124	56.84876
11	12555157	45.50605	54.49395
12	13761543	47.61286	52.38714
13	15037192	49.49327	50.50673
14	16387961	51.16862	48.83138
15	17819954	52.65929	47.34071
16	19339598	53.98430	46.01570
17	20953704	55.16113	44.83887
18	22669515	56.20567	43.79433
19	24494756	57.13230	42.86770
20	26437673	57.95394	42.04606
21	28507079	58.68216	41.31784
22	30712395	59.32730	40.67270
23	33063699	59.89863	40.10137
24	35571768	60.40437	39.59563
25	38248134	60.85187	39.14813
26	41105132	61.24768	38.75232
27	44155957	61.59761	38.40239
28	47414730	61.90686	38.09314
29	50896558	62.18003	37.81997
30	54617604	62.42123	37.57877

Chole
sky
Orderi
ng:
DPRP
P DPE
